Resume buku

Konstistusi dan Hak Asasi Manusia

Oleh :

M.FAISAL

HTN-E

10200120180

BAB 1

HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak hak yang dimiliki manusia karena ia sebagai manusia bukan memiliki hak tersebut karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang mengaturnya tetapi semata mata martabanya sebagai manusia oleh karena nya walaupun manusia terlahir dengan keadaan kulit hitam coklat putih kelamin laki laki maupun perempuan. Bahasa yang berbeda beda budaya yang beragam maka ia tetap mempunyai hak hak tersebut kondisi demikian yang disebut dengan universalitas HAM.

Konsep HAM memang muncul dan berkembang sebagai produk masyarakat modern di abad ke-20. Namun dalam perkembangan kebudayaan umat manusia, perjuangan system nilai HAM dapat dilacak dalam sejarah kebudayaan masyarakat terdahulu.

Gagasan HAM jelas berawal dari filsafat hukum alam yang berujung dengan munculnya teori kontrak social. Gagasan kontrak social inilah yang meruntuhkan kesucian tahta raja atau dominasi konsep divine rights of king. Hal ini sebagai mana lord acton yang menekankan pentingnya membatasi kekuasaan karena kekuasaan cenderung disalahgunakan secara absolut. Gagasan tersebut yang kemudian menimbulkan lahirnya penandatanganan perjanjian untuk meruntuhkan kedaulatan secara mutlak, sekaligus melandasi beragam nya pandangan tentang HAM.

Bangsa Indonesia melalui Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagi makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Konsep dasar HAM

Konsep dasar hak asasi manusia (HAM) dapat didefinisikan dengan pendekatan bahasa maupun pendekatan istilah. Secara etimologi, kata “hak” merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Kata “Asasi” berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensi nya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup sebagai hak dasar yang dimiliki manusia, sehingga tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

Secara istilah, beberapa tokoh dan praktisi hak asasi manusia (HAM) memiliki pemahaman akan makna HAM. Baharudin Lopa, dengan mengutip pernyataan Jan Materson dari Komnas HAM PBB, mengutarakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.

Menurut John Locke, seorang ahli pikir di bidang ilmu negara berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Ia memperinci hak asasi manusia sebagai berikut :

1. Hak hidup (the right of life)
2. Hak kemerdekaan (right to liberty)
3. Hak milik (right to property)

Konsep hak asasi manusia terus mengalami transformasi. Pada tanggal 6. Januari 1941, Franklin Delano Roosevelt memformulasikan 4 macam hak-hak asasi manusia (the four freedoms) di depan Kongres Amerika Serikat, yaitu :

1. Bebas untuk berbicara (freedom of speech)
2. Bebas dalam memeluk agama (freedom of religion)
3. Bebas dari rasa takut (freedom of fear)
4. Bebas terhadap suatu keinginan/ kehendak (freedom of from want)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat dari hak asasi manusia adalah keterpaduan antara hak asasi manusia (HAM), kewajiban asasi manusia (KAM), dan tanggung jawab asasi manusia (TAM) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Hak asasi manusia juga dapat bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar, dan kekuasaan pemerintah. Bahkan HAM memiliki kewenangan yang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan.

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Piagam madinah (tahun 622) disusun oleh nabi Muhammad SAW, merupakan perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di yastrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum yahudi, dan komunitas pagan (penyembah berhala) madinah sehingga membuat mereka menjadi suatu umat.

Magna charta (15 juli 1215) yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat.

Bill of Rights (1689), ditandatangani Raja William III. Disebut juga undang-undang hak 1689. Undang-undang yang diterima Parlemen Inggris yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II yang dinenai dengan istilah the glorious revolution of 1688. Bill of Rights muncul sebagai undang-undang yang mengatur HAM di ranah politik dan sosial. Dengan adanya Bill of Rights pada sistem pemerintahan Inggris yang monarkhi absolut, menjamin Raja dan Ratu untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Seperti salah satu isinya bahwa parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

The universal declaration of human right (DUHAM) tentang hak asasi manusia yang diproklamkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan 'menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan

mendasar dari deklarasi sebelumnya. Louis Henkin dan James W. Nickle dalam *making sense of human Right* (1996) menyebutkan bahwa manifesto Hak Asasi Manusia Muktahir telah melunakkan individualisme dalam teori teori klasik mengenai hak hak kodrati (sebagai hak yang berasal dari Tuhan) dan lebih menekankan sifat persamaan (egaliterianisme). Semenjak ini penegakkan HAM menjadi semakin gencar diseluruh dunia. HAM telah mengalami internasionalisasi.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka menurut Philipus M. Hadjon, hak asasi manusia konsep barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk Negara dan organ organnya dan peletakkan kewajiban Negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (claim) akan hak terhadap Negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara.

Karel vasak menggunakan istilah 'generasi' dalam melihat perkembangan substansi hak hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia dengan menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu.

Dalam perkembangan HAM setidaknya tidaknya telah mengalami tiga generasi perkembangan. Yaitu generasi pertama, yang menekankan pada hak hak sipil dan politik, generasi kedua yang menekankan kepada hak hak ekonomi dan social budaya, generasi ketiga yang menekankan pada hak hak pembangunan.

Jika dilihat dari perspektifnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia dikategorikan menjadi empat generasi : generasi pertama, pada generasi ini bahwa substansi pemikiran HAM berpusat pada aspek Hukum dan Politik. perkembangan hak asasi manusia generasi pertama ini menekankan pada hak hak sipil dan politik, yakni hak hak asasi manusia yang 'klasik' hak hak

ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari absolutism Negara sebagaimana yang muncul dalam revolusi Amerika dan Perancis.

Generasi kedua, setelah perang dunia kedua. Negara baru tidak hanya menuntut hak hak yuridis, melainkan hak hak social, ekonomi, politik dan budaya. Pada generasi ini lahir dua perjanjian yang terkenal yaitu covenant on economic, social and cultural right; dan international covenant on civil and political right. Keduanya telah disepakati dalam siding umum PBB pada 1966. Puncak perkembangan ini tercapai dengan ditandatanganinya International Cou-venant on Eco-nomic, Social and Cultural Right pada tahun 1966. Hak hak generasi kedua ini sering pula dianggap bukanlah hak yang 'riil' sehingga ada persepsi yang menyangkal keberadaan hak hak ekosob ini kedalam rezim hukum hak asasi manusia.

Pada tahun 1986 muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan, ha katas pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa. Konsepsi inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia generasi ketiga. Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama yang merupakan rekonseptualitas dari kedua generasi HAM.

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), sarekat islam (1911), indische partij (1912), partai komunis Indonesia (1920), perhimpunan Indonesia (1925), dan partai nasional Indonesia

(1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bias dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa colonial, penjajahan, dan pemerasan hak hak masyarakat terjajah. Puncak perdebatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional terjadi dalam siding BPUPKI.

Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi Oetomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyurakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah colonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Inti dari perjuangan Boedi Oetomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat.

Dalam sejarah bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewang wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan dan keadilan yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.

Pada masa penjajahan tersebut, masyarakat Indonesia sendiri dibedakan menjadi tiga strata social yang terdiri dari masyarakat eropa sebagai kelas pertama, masyarakat timur asing (china, arab, india) sebagai kelas kedua dan masyarakat inlander sebagai masyarakat kelas tiga. Adanya strata social tersebut menimbulkan diskriminasi di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, social, politik, pendidikan, hukum, hingga budaya.

Pola diskriminasi yang timbul saja tidak tentu mencerminkan nilai - nilai hak asasi manusia yang ada yang pada akhirnya memicu suatu pergolakan didalam masyarakat itu sendiri dan mendorong adanya ide universalisme

tentang HAM. Realisasi dari ide universalisme HAM itu sendiri memunculkan 3 generasi, diantaranya:

Generasi Pertama, perkembangan hak - hak sipil dan politik (seperti: hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan hukum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berbicara, hak atas informasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk referendum, dsb)

b) Generasi kedua, perkembangan hak-hak sosial, termasuk hak-hak ekonomi dan budaya (seperti hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapat kepastian hukum tentang jam kerja, hak libur, hak melakukan mogok kerja, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk melakukan penelitian ilmiah dan melakukan penemuan, dsb)

c) Generasi ketiga, perkembangan hak-hak solidaritas/kolektif (seperti: hak untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan mengembangkan dimensi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang spesifik dapat ditemukan dalam kerangka bangsa, nasional, etnik, agama, dan budaya minoritas, dalam hubungannya dengan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak untuk berbeda bahasa, berbeda kebudayaan) Adanya warna dan perkembangan dan penyempurnaan nilai – nilai HAM melalui ketiga generasi tersebut, mencerminkan semua manusia setara hak asasinya tanpa diskriminasi. HAM juga merupakan suatu sistem nilai yang diakui secara universal. Dari konsepsi oleh negara negara yang ini muncul pengakuan HAM memiliki kewajiban untuk melindungi (to protect) menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill) HAM sebagai suatu hak kodrat setiap warga negaranya.

BAB 4

HAM DALAM KONSTITUSI

Konstitusi merupakan nafas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa tidak terkecuali di Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara nyata, oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan, dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, terdapat pandangan yang beragam. Setidaknya ada tiga kelompok pandangan yakni pertama mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif kedua mereka berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; yang ketiga berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan jaminan pokok pokok atas HAM.

Rumusan mengenai HAM dalam konstitusi RIS cukup berbeda dibandingkan rumusan yang terdapat dalam UUD 1945. Konstitusi RIS lebih memberikan penekanan signifikan terhadap pengaturan HAM. Penekanan terhadap jaminan HAM yang ada pada konstitusi RIS secara historis banyak dipengaruhi dengan keberadaan DUHAM. Dalam konteks hak-hak dasar yakni kebebasan berserikat dan berkumpul, konstitusi RIS juga memuat pengaturan mengenai hal itu. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 20 yang berbunyi “Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berpendapat secara damai diakui dan sekedar perlu”.

Dalam UUDS 1950 juga memuat hal-hal yang merupakan perkembangan dari HAM itu sendiri, disamping pengakuan terhadap individu-

individu sebagai pencerminan HAM, diatur mengenai Materi Ham dalam UUDS 1950 terdiri dari 36 pasal yang terbagi dalam dua bab, bagian V tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, yakni pasal 7 – pasal 34 dan bagian VI tentang asas-asas Dasar, yaitu pasal 35 – pasal 43. Hak-hak dasar manusia dalam UUDS 1950 tidak saja mencakup hak asasi, tetapi terdapat kewajiban asasi, serta terdapat sejumlah larangan atas adanya pelanggaran HAM, namun dalam UUDS 1950 mengatur adanya hak milik sebagai fungsi social dna ketemtuan-ketentuan lainnya yang bersifat social masyarakat dan hak-hak.

Gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia memicu perubahan yang signifikan mengenai HAM. perubahan UUD 1945 constitutional reform yang sebelumnya hanya memuat 71 butir menjadi 199 butir ketentuan. Terlihat pada perubahan kedua dan ketiga dalam Sidang MPR tahun 2000 yang meliputi HAM dalam Pasal 28A-28J. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Dampak dari amandemen menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, utamanya pemerintah, meskipun pada tahun pertama reformasi ditandai oleh konflik horizontal, antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, dimana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Bahkan terdapat beberapa agenda demokrasi yang dicanangkan pasca era Presiden Soeharto, diantaranya:

- 1) Constitutional and rule of law;
- 2) Regional autonomy;
- 3) Civil-military relation,
- 4) Civil society
- 5) Governance structure reform, social-economic development, good governance, and ombudsman;

6) Gender;" Religion pluralism.

7) Religin pluralism

BAB 5

HAM DALAM PRESPEKTIF ANAK DAN PEREMPUAN

Hak anak ini termuat di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan konvensi PBB tentang Hak Anak yang mulai berlaku pada tanggal 2 september 1990. Pasal 49 (1) konvensi ini, anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Sementara itu penjelasan mengenai hak anak yang ada didalam ketentuan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Perwujudan pelaksanaan perlindungan anak dilihat dari undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini bagian khusus yang mengatur tentang perlindungan anak dapat dilihat dalam ketentuan bab IX penyelenggaraan perlindungan, dari pasal 42 hingga pasal 71. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya ada sedikit perubahan di beberapa pasal seperti yang tertuang di dalam ketentuan

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kekerasan terhadap perempuan disebut juga terhadap perempuan berbasis gender seperti tercantum dalam rekomendasi umum Nomor 19 komite penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan deklarasi majelis PBB tahun 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah, dilingkungan kerja maupun dalam masyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan menerimanya sebagai hal biasa dan kebanyakan laki laki menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Belum banyak laki laki dan perempuan yang memandang keadaan tersebut sebagai wujud diskriminasi terhadap perempuan dan menyadari bahwa konsekuensi dari diskriminasi tersebut adalah banyak terjadi berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk penegasan mengenai diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tidaklah dengan mudah dicapai. Baru pada sidang umum PBB ke-5 pada tanggal 20 Desember 1993, deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan baru disahkan yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan, kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan menikmati hak-hak asasi dan kebebasan nya.

BAB 6

PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM DI INDONESIA

Secara sederhana penegakan HAM dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan kepastian keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat maka dibentuklah suatu pengadilan Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dengan pasal 104 ayat (1) UUNo.39/1999 tentang hak asasi manusia.

Pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak Asasi Manusia yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti UU No.1/1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh dewan perwakilan rakyat republic Indonesia menjadi undang-undang dan oleh karena itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut perlu dicabut. Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan UU No.26/2000 dibentuklah pengadilan HAM.

Ketentuan hukum acara proses peradilan hak asasi manusia sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam Bab IV pasal 10-33 UU No.26 tahun 2000. Dimulai dari penangkapan yang diatur di pasal (11) jaksa agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan disertai pula dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan, kemudian memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan suatu undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan menyingkirkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.